

## Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Pengaruh Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung

Eva Warninda

[evhawarninda@gmail.com](mailto:evhawarninda@gmail.com)

Otniel Safkaur

Dhyta M. Nababan

Jurusan Akuntansi Universitas Cenderawasih

### ABSTRACT

*This study analyzes the influence of managerial competence, internal control systems, and the utilization of information technology on the accountability of village fund management, as well as the moderating role of community participation in Arso Barat District, Keerom Regency. The research used a quantitative approach with a survey method, distributing questionnaires to 36 respondents, and data were analyzed using SmartPLS 4. The results show that managerial competence and information technology utilization do not have a significant effect on accountability, while internal control systems have a positive and significant effect. Community participation does not moderate the relationships among these variables. This study recommends strengthening internal control systems, enhancing the technical competence of village officials, and empowering communities to encourage greater participation in supervising village fund management.*

**Keywords:** *community participation; accountability; village funds*

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan komitmen negara untuk melindungi, memberdayakan, dan memandirikan desa agar kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Kebijakan tersebut terealisasi melalui alokasi Dana Desa yang signifikan setiap tahunnya. Dana kampung bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, alokasi APBN, bantuan keuangan APBD provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga. Namun, besarnya dana yang diterima belum sepenuhnya berdampak optimal pada kesejahteraan masyarakat karena lemahnya tata kelola keuangan desa.

Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, terutama Distrik Arso Barat, dana kampung rata-rata mencapai Rp1,2 miliar per tahun per kampung. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur terbatas, serta sumber daya manusia yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam pengelolaannya. Padahal, dana kampung memiliki fungsi strategis dalam pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat kampung yang mampu mengoptimalkan pengelolaan dana seperti Kampung Sanggaria yang menyelenggarakan pameran UMKM dan pasar malam untuk mendorong partisipasi masyarakat, serta Kampung Yatu Raharja yang mempublikasikan realisasi dana kampung secara daring sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Namun, sebagian besar kampung lainnya masih mengalami keterbatasan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Rasionalisasi masalah ini mengacu pada teori stewardship yang menekankan pentingnya kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Kompetensi pengelola mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, sikap, dan integritas yang mendukung pengelolaan keuangan publik secara

transparan dan efektif. Sistem pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalisir risiko penyelewengan dana. Pemanfaatan teknologi informasi juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi, meskipun di Distrik Arso Barat baru sebagian kecil kampung yang memiliki akses internet stabil dan infrastruktur memadai.

Partisipasi masyarakat berpotensi memoderasi hubungan antara kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana kampung. Namun, Badan Pusat Statistik Keerom (2020) melaporkan bahwa hanya 35% masyarakat yang terlibat aktif dalam musrenbang kampung, dengan tingkat partisipasi perempuan sebesar 20% dan pemuda 15%. Rendahnya partisipasi masyarakat menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti peran moderasi partisipasi masyarakat dalam hubungan ketiga faktor tersebut dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: apakah kompetensi pengelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung; apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung; apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung; dan apakah partisipasi masyarakat memoderasi hubungan ketiga variabel tersebut dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung, serta untuk menguji peran moderasi partisipasi masyarakat pada hubungan ketiga variabel tersebut terhadap akuntabilitas. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola dana kampung, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan di Distrik Arso Barat maupun wilayah lain dengan karakteristik serupa.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Teori Stewardship**

Teori stewardship dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), menjelaskan bahwa pengelola organisasi bertindak sebagai steward atau pelayan yang mengutamakan kepentingan organisasi dan publik di atas kepentingan pribadi. Stewardship theory berasumsi bahwa manajer memiliki motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab dan bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks pengelolaan dana kampung, teori ini relevan karena menekankan bahwa aparatur kampung memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola dana publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Teori stewardship menegaskan pentingnya nilai kepercayaan (trust), komitmen, integritas, dan loyalitas pengelola terhadap organisasi dan masyarakat. Matani dan Hutajulu (2021) menyatakan bahwa kepala kampung dan aparat desa sebagai steward diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kampung. Dengan demikian, kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam teori stewardship untuk menciptakan tata kelola keuangan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Teori ini menjadi landasan konseptual penelitian karena mengintegrasikan variabel kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kerangka akuntabilitas pengelolaan dana kampung secara holistic.

### **2.2 Kompetensi Pengelola dan Akuntabilitas Dana Kampung**

Kompetensi pengelola adalah kemampuan aparatur kampung dalam melaksanakan tugasnya, yang mencakup pengetahuan teknis, keterampilan administrasi keuangan, pemahaman regulasi, integritas, serta sikap pelayanan publik. Hoekstra et al. (2022) menemukan bahwa kompetensi pengelola dana

kampung yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena pengelola dapat memahami dan melaksanakan prosedur dengan baik, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta meminimalisir kesalahan pelaporan. Sarah et al. (2020) juga menyatakan bahwa kompetensi keuangan aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019) di Kabupaten Kebumen menunjukkan kompetensi pengelola desa yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana desa karena mereka memahami regulasi dan mampu mengimplementasikannya dalam perencanaan hingga pelaporan dana desa. Dalam konteks teori *stewardship*, kompetensi pengelola menjadi salah satu modal utama untuk mengelola dana kampung secara bertanggung jawab dan akuntabel. Namun, di Kabupaten Keerom masih ditemukan kelemahan kompetensi aparatur karena keterbatasan pendidikan formal, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan rendahnya literasi digital. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana kampung yang optimal.

### **2.3 Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Dana Kampung**

Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan andal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Budiana et al. (2019), sistem pengendalian internal yang efektif meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berjalan secara terintegrasi. Bonsu et al. (2022) menunjukkan sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas organisasi publik karena risiko kesalahan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir melalui prosedur dan kontrol yang ketat. Sarifah et al. (2019) juga menemukan penguatan sistem pengendalian internal di desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa.

Dalam teori *stewardship*, sistem pengendalian internal mendukung pengelola (*steward*) untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan dana kampung dikelola sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, di kampung-kampung di Kabupaten Keerom, implementasi sistem pengendalian internal masih terbatas akibat keterbatasan SDM, belum lengkapnya SOP, serta lemahnya fungsi pengawasan internal dan eksternal.

### **2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Dana Kampung**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana kampung mencakup penggunaan aplikasi keuangan seperti SISKEUDES, Excel, atau software lainnya untuk pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Rahman et al. (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan efisiensi administratif, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana kampung. Puspitasari et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES menurunkan temuan audit hingga 60% dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa hingga 40% karena pencatatan lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dalam teori *stewardship*, pemanfaatan teknologi informasi mendukung *steward* dalam melaksanakan tugasnya secara efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Namun, di Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, pemanfaatan teknologi informasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet, pemadaman listrik berkala, serta rendahnya literasi digital aparatur kampung. Oleh karena itu, optimalisasi teknologi informasi harus didukung pelatihan, sarana prasarana yang memadai, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung transformasi digital di tingkat kampung.

## **2.5 Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1 Kompetensi Pengelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Penelitian terdahulu menunjukkan kompetensi pengelola memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Hoekstra et al. (2022) menyatakan aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi mampu memahami regulasi keuangan desa, menyusun laporan sesuai standar, serta mengelola dana kampung dengan tepat sasaran. Sarah et al. (2020) juga menegaskan bahwa kompetensi keuangan aparatur desa berkontribusi signifikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik. Kompetensi pengelola meliputi kemampuan teknis administrasi keuangan, pemahaman peraturan, dan sikap integritas yang mendukung pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab. Berdasarkan teori stewardship, kompetensi pengelola merupakan modal dasar bagi steward dalam mengelola dana kampung secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

**H1: Kompetensi pengelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**

### **2.5.2 Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Sistem pengendalian internal berfungsi memastikan penggunaan dana kampung sesuai rencana dan peraturan melalui kebijakan, prosedur, dan aktivitas pengawasan yang terintegrasi. Budiana et al. (2019) menemukan sistem pengendalian internal yang efektif mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Bonsu et al. (2022) juga menunjukkan sistem pengendalian internal yang baik menekan risiko penyelewengan dan meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Dalam teori stewardship, sistem pengendalian internal mendukung steward dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sehingga tercipta tata kelola dana kampung yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**

### **2.5.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung**

Pemanfaatan teknologi informasi meliputi penggunaan aplikasi keuangan seperti SISKEUDES atau software lainnya dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan kampung. Rahman et al. (2023) menyatakan teknologi informasi membantu proses administrasi keuangan desa menjadi lebih sistematis, cepat, dan akurat, serta meningkatkan transparansi. Puspitasari et al. (2022) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi menurunkan temuan audit hingga 60% dan meningkatkan efisiensi administrasi hingga 40% karena mempermudah pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Dalam teori stewardship, pemanfaatan teknologi informasi mendukung steward dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, akurat, dan dapat diakses publik. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diajukan:

**H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**

### **2.5.4 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Hubungan Kompetensi Pengelola dan Akuntabilitas**

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana kampung. Prasetyo et al. (2022) menyatakan partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh kompetensi pengelola terhadap akuntabilitas karena masyarakat mengawasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta menuntut transparansi dan pelaporan

yang akurat. Apabila kompetensi pengelola tinggi didukung partisipasi masyarakat yang aktif, akuntabilitas akan semakin optimal. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, pengelola yang kompeten pun belum tentu menghasilkan akuntabilitas maksimal karena tidak ada pengawasan sosial yang menuntut tanggung jawab publik. Berdasarkan teori stewardship, partisipasi masyarakat sebagai principal akan memperkuat peran steward dalam mewujudkan tata kelola dana kampung yang akuntabel. Oleh karena itu, hipotesis keempat diajukan:

**H4: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan kompetensi pengelola dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**

**2.5.5 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas**

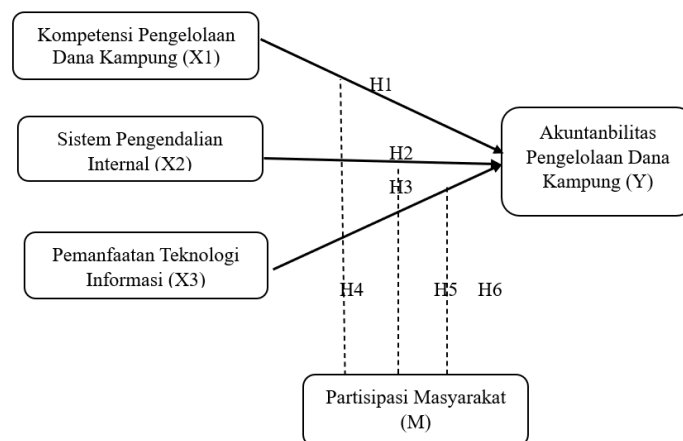
Center for Indonesian Policy Studies (2023) menyatakan partisipasi masyarakat dapat memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal. Masyarakat yang terlibat aktif akan mengawasi implementasi SOP dan penggunaan dana kampung, memberikan fungsi pengawasan sosial, serta menutup celah moral hazard dan penyelewengan dana. Dalam teori stewardship, partisipasi masyarakat membantu steward menjalankan prosedur pengendalian internal secara disiplin dan bertanggung jawab. Apabila sistem pengendalian internal kuat dan didukung partisipasi masyarakat tinggi, maka akuntabilitas akan tercapai optimal. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, sistem pengendalian internal tidak berjalan efektif karena minim pengawasan eksternal. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis kelima diajukan:

**H5: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**

**2.5.6 Partisipasi Masyarakat Memoderasi Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas**

Puspitasari et al. (2022) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas apabila masyarakat memiliki literasi digital yang memadai dan kemauan untuk mengakses serta memahami informasi keuangan yang dipublikasikan. Jika partisipasi masyarakat tinggi, teknologi informasi tidak hanya menjadi formalitas administrasi, melainkan sarana kontrol publik yang efektif. Dalam teori stewardship, partisipasi masyarakat memastikan steward memanfaatkan teknologi informasi untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Oleh karena itu, hipotesis keenam dirumuskan:

**H6: Partisipasi masyarakat memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.**



**Gambar 1.**  
**Model Penelitian**

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kuesioner. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh dan hubungan antar variabel, serta untuk memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. Metode survei memungkinkan peneliti mengumpulkan data primer langsung dari responden dalam jumlah yang relatif besar dalam waktu singkat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan ilmiah. Selain itu, penelitian ini bersifat eksplanatori (penjelasan) karena berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana kampung), serta menguji peran moderasi partisipasi masyarakat dalam hubungan tersebut. Populasi seluruh aparat kampung dan masyarakat setempat di Distrik Arso Barat. Sampel diambil menggunakan purposive sampling dengan kriteria, aparat kampung yang telah bekerja minimal 1 tahun dan masyarakat yang berdomisili minimal 5 tahun.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil**

Penelitian ini dilakukan pada 29 Mei – 4 Juni 2025 di Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, dengan jumlah responden 36 orang yang terdiri dari aparat kampung dan masyarakat. Penyebaran kuesioner dilakukan langsung untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

**Tabel 1.**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Uji Parsial**

	<b>Original sample (O)</b>	<b>Sample mean (M)</b>	<b>Standard deviation (STDEV)</b>	<b>T statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P values</b>
<b>X1 -&gt; Y</b>	-0.205	-0.164	0.207	0.992	0.321
<b>X2 -&gt; Y</b>	0.755	0.694	0.246	3.075	0.002
<b>X3 -&gt; Y</b>	0.157	0.125	0.194	0.809	0.418

Sumber: Olah data, 2025

**Tabel 2.**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Uji Moderasi**

	<b>Original sample (O)</b>	<b>Sample mean (M)</b>	<b>Standard deviation (STDEV)</b>	<b>T statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P values</b>
<b>M x X1 -&gt; Y</b>	0.097	0.079	0.269	0.360	0.719
<b>M x X2 -&gt; Y</b>	0.039	-0.057	0.295	0.133	0.895
<b>M x X3 -&gt; Y</b>	-0.004	0.074	0.354	0.013	0.990

Sumber: Olah data, 2025

**4.2 Pembahasan**

**4.2.1 Pengaruh Kompetensi Pengelola Terhadap Akuntabilitas**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi pengelola tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Distrik Arso Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengelola kampung memiliki kompetensi dasar seperti pemahaman administratif, sikap kerja yang baik, dan keramahan dalam pelayanan publik, kemampuan teknis mereka terkait pengelolaan keuangan dana kampung masih terbatas. Kompetensi teknis yang dimaksud meliputi pemahaman detail terkait prosedur perencanaan anggaran, pelaporan keuangan berbasis SISKEUDES, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagian besar aparat kampung hanya mampu melakukan tugas rutinitas administratif tanpa inovasi pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, berdasarkan wawancara lapangan, beberapa aparat kampung menyebutkan belum pernah mengikuti pelatihan khusus pengelolaan dana kampung sejak menjabat. Pelatihan biasanya hanya diikuti oleh Kepala Kampung dan Kaur Keuangan, sedangkan perangkat lain tidak dilibatkan. Minimnya pelatihan yang inklusif menyebabkan pemahaman aparat kampung tentang prinsip akuntabilitas keuangan menjadi rendah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hoekstra et al. (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi pengelola yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas karena mereka memahami prosedur dengan baik dan melaksanakan sesuai aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelola di Distrik Arso Barat belum berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana kampung.

#### **4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas**

Berbeda dengan kompetensi pengelola, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Artinya, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal di kampung, maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampung akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menekankan pentingnya adanya struktur kontrol, prosedur, dan evaluasi dalam memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Di Distrik Arso Barat, pengendalian internal dilakukan melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas, proses otorisasi belanja kampung oleh Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, serta pencatatan transaksi pada buku kas umum. Selain itu, adanya pendampingan dan supervisi rutin dari pendamping lokal desa dan pihak inspektorat daerah memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Informan lapangan menyebutkan bahwa ketika ada pemeriksaan rutin, aparat kampung menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan dana kampung dan memastikan laporan keuangan dibuat tepat waktu dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Distrik Arso Barat.

#### **4.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Padahal secara teori, teknologi informasi seharusnya mempermudah pencatatan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian laporan keuangan dana kampung. Tidak signifikannya pengaruh ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di Distrik Arso Barat, seperti jaringan internet yang tidak stabil, pemadaman listrik yang sering terjadi, serta keterbatasan fasilitas komputer di kantor kampung.

Selain itu, faktor lain adalah rendahnya literasi digital aparat kampung. Berdasarkan wawancara lapangan, sebagian besar aparat kampung hanya menggunakan komputer untuk mengetik surat dan laporan biasa, sedangkan penggunaan aplikasi SISKEUDES masih sangat terbatas dan hanya dikuasai oleh operator kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi hanya bersifat administratif dasar dan belum mendukung optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

kampung. Oleh karena itu, pengadaan sarana TI harus dibarengi dengan pelatihan teknis dan pendampingan intensif agar aparat kampung mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal.

#### **4.4 Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Hubungan Kompetensi Pengelola dan Akuntabilitas**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan kompetensi pengelola dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Artinya, meskipun kompetensi pengelola meningkat, jika partisipasi masyarakat rendah maka tidak akan berdampak signifikan pada peningkatan akuntabilitas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kampung. Musrenbangdes hanya dihadiri oleh segelintir masyarakat dan dominasi keputusan tetap dipegang oleh aparat kampung dan tokoh adat. Informan lapangan menyebutkan bahwa masyarakat hanya diundang untuk memenuhi formalitas tanpa benar-benar diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan pengawasan.

#### **4.5 Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas**

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pengendalian internal kampung sudah baik, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengawasan, maka dampaknya pada peningkatan akuntabilitas menjadi kurang optimal. Hal ini bertentangan dengan teori stewardship yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai kontrol sosial yang memperkuat pengawasan internal. Berdasarkan wawancara lapangan, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara detail penggunaan dana kampung, mereka hanya melihat hasil fisik pembangunan tanpa mengetahui proses perencanaan dan penganggarnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat akuntabilitas, perlu ada mekanisme keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penggunaan dana kampung.

#### **4.6 Moderasi Partisipasi Masyarakat pada Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas**

Hasil uji moderasi juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Padahal, dalam teori dan penelitian terdahulu, penggunaan teknologi informasi yang transparan dapat meningkatkan akuntabilitas jika masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya. Namun, di Distrik Arso Barat, keterbatasan literasi digital masyarakat dan minimnya sosialisasi mengenai aplikasi atau website dana kampung menyebabkan teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan. Informan lapangan menyebutkan bahwa meskipun ada laporan dana kampung yang dipublikasikan, masyarakat tidak pernah mengaksesnya karena tidak memahami cara penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi harus berjalan beriringan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana kampung secara efektif.

### **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi pengelola tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Hasil ini dibuktikan dengan nilai  $t$ -statistic sebesar  $0.992 < 1.96$  dan  $p$ -value  $0.321 > 0.05$ , yang berarti hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat kampung memiliki pendidikan formal yang baik, kompetensi teknis mereka terkait pengelolaan dan pelaporan

- keuangan kampung belum memadai. Kurangnya pelatihan intensif dan rendahnya inisiatif pengelola untuk mempelajari aplikasi pengelolaan dana kampung menyebabkan kompetensi tidak berdampak optimal pada peningkatan akuntabilitas.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar  $3.075 > 1.96$  dan p-value  $0.002 < 0.05$ , sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan dana kampung, maka semakin tinggi akuntabilitas yang tercipta. Pengendalian internal yang meliputi pembagian tugas, pencatatan transaksi, otorisasi belanja, serta pemantauan dan evaluasi berkala terbukti efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Distrik Arso Barat.
  3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Nilai t-statistic yang diperoleh sebesar  $0.809 < 1.96$  dan p-value  $0.418 > 0.05$ , sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan pemadaman listrik rutin, serta rendahnya literasi digital aparat kampung menjadi faktor utama yang menyebabkan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung akuntabilitas.
  4. Partisipasi masyarakat tidak memoderasi hubungan antara kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Hasil pengujian menunjukkan seluruh hipotesis moderasi (H4, H5, H6) ditolak karena nilai t-statistic  $< 1.96$  dan p-value  $> 0.05$ . Hal ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat di Distrik Arso Barat masih rendah. Musrenbangdes hanya dihadiri sebagian kecil masyarakat, dan dominasi pengambilan keputusan oleh elit lokal mengurangi efektivitas kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan dana kampung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. A., & Wawo, A. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2), 177–195.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14–25. <https://doi.org/10.36694/jimat.v10i1>
- Aulia, P., Agusti, R., & Julita. (2018). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 1(3), 1–15.
- Bonsu, A. B., Appiah, K. O., Gyimah, P., & Owusu-Afriyie, R. (2022). Public sector accountability: Do leadership practices, integrity and internal control systems matter? *IIM Ranchi Journal of Management Studies*. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-02-2022-0010>
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.